



Aset Kendala Raih WTP

DPD Sarankan Koordinasi dengan Pemprov

SAMBAS, TRIBUN - Ketua Tim Komite IV DPD RI, Erma Suryani Ranik SH menyarankan Pemkab Sambas segera berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar dan BPKAD Kalbar terkait permasalahan aset di daerah ini.

Koordinasi ini untuk menyelesaikan persoalan aset Sambas yang masih terkait dengan Bengkayang dan Singkawang. Akibatnya, Sambas terkendala dalam mencapai opini pengeloaan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Silakan teman-teman berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan BPKAD apa yang menjadi hak Sambas, Singkawang dan Bengkayang," ujar Erma saat melakukan rapat kerja tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester I dan II tahun 2013 di Sambas, Rabu (11/6).

Bersama 9 anggota tim lainnya, Erma mengatakan kunjungan kerja yang dimulai sejak Senin (9/6), difokuskan pada Singkawang, Bengkayang dan Sambas (Singbebas). Dia mengangap ketiga daerah itu unik, karena pada awalnya wilayah ketiganya tergabung dalam satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas.

Dengan latar belakang tersebut, saat ini ketiga daerah itu memiliki problem yang sama dalam meraih WTP, yaitu persoalan aset. "Sambas ada aset tetapnya yang membuatnya tidak bisa meraih WTP, itu harusnya diselesaikan," ujar Erma.

Melalui tatap muka secara langsung dengan pemda, inspektoral, perwakilan BPK Kalbar ini, tim DPD RI berupaya memfasilitasi penyelesaian ma-



TRIBUNDOK Ketua Tim Komite IV DPD RI

"Silakan teman-teman berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan BPKAD apa yang menjadi hak Sambas, Singkawang dan Bengkayang"

ERMA S RANIK

salah tersebut. Setelah masalah selesai, diharapkan Singbebas mampu mendapatkan opini WTP. "WTP ini saya percaya tidak pernah diberikan penilaian luar biasa, kalau tidak bekerja dengan baik," kata dia.

Menurut Erma, daerah yang meraih opini WTP, kondisinya akan jauh lebih baik. Terlebih, Kementerian Keuangan akan memberikan reward kepada daerah peraih WTP sebanyak Rp 20-25 miliar.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Sambas, Jamiat A Kadol, menuturkan, Pemda Sambas

sejak 2011 sudah memiliki niat baik menyelesaikan permasalahan. "Bahkan inisiatif (penyelesaian aset) dari kita, harusnya ini menjadi kewenangan provinsi," ujarnya.

Sekda mengakui permasalahan aset di Kabupaten Sambas buntut dari pemekaran daerah otonomi. "Sambas saat itu pertama kali melakukan pemekaran dari 27 provinsi dan menjadi percontohan otonomi daerah," katanya.

Setelah pemekaran, kata Jamiat, persoalan aset ini mengalami penundaan terus tan-

pa ada kejelasan penyelesaiannya. "Sehingga banyak aset yang tidak jelas. Awalnya dulu banyak kantor departemen (kandep) menjadi dinas. Sehingga semua aset dan orangnya menjadi punya pemda," ujarnya.

Kondisi ini berbeda dengan pemekaran daerah yang terjadi setelah Sambas. Seperti ketika pembentukan Landak yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Pontianak dan Sekadau yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Sanggau, persiapannya sudah lebih matang.

Sebelumnya, Kasubdirektorat 1 BPK RI Perwakilan Wilayah Kalbar, Petris Sihombing mengatakan, Pemkab Sambas harus segera berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar dalam menyelesaikan persoalan aset. "Selesaikanlah aset dulu, clearkan semua, itu utamanya," ujarnya. (ita)

Pansus Verifikasi

KETUA DPRD Kabupaten Sambas, H Mas'ud Sulaiman, mengatakan, kedatangan Komite IV DPD RI berkaitan dengan tindak lanjut pemda terhadap rekomendasi BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011 dan 2012. "Kabupaten Sambas pada 2011, 2012 dan 2013 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK," ujarnya.

Sementara yang menjadi pengecualian adalah berkaitan dengan pengelolaan aset yang belum tuntas, setelah pemekaran daerah. "Hal ini diakui oleh pemda melalui sekda, dimana aset pasca pembentukan Kabupaten Bengkayang belum tuntas. Walaupun sebagian aset sudah diserahkan," jelasnya.

Sementara beberapa aset juga sedang dalam proses untuk diserahkan. Mas'ud mengatakan, Bupati telah meminta persetujuan dari

DPRD Sambas untuk penyerahan aset tersebut. "Saya selaku ketua DPRD membenarkan hal tersebut dan panitia khusus DPRD sedang melakukan verifikasi ke lapangan sebagai tindak lanjut dari surat bupati di maksud," ujarnya.

Ia berharap sebelum berakhir masa jabatannya, DPRD periode 2009-2014 melalui pansus sudah dapat menyelesaikannya. Penyelesaian ini dalam upaya mendorong pemerintah daerah untuk mendapatkan opini WTP di tahun mendatang.

"Anggota DPD RI menyarankan agar pemprov dapat memfasilitasi penyelesaian masalah aset, mengingat masalahnya bukan hanya ada di Kabupaten Sambas, tetapi berkaitan dengan kabupaten/kota hasil pemekaran yakni Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang," jelasnya. (ita)